

IMPLEMENTASI PROGRAM WAJIB BELAJAR SEMBILAN (9) TAHUN PADA LEMBAGA PENDIDIKAN MUHAMMADIYAH DI MANDAILING NATAL

Rizaluddin*, Syamsu Nahar, Edi Saputra*****

*Mahasiswa Program Studi Pendidikan Islam, Kosentrasi Manajemen
Pendidikan Islam Pascasarjana UIN Sumatera Utara

**Dr. S.si., M.A Co Author Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

***Dr. M.Hum Co Author Dosen Pascasarjana UIN Sumatera Utara

Abstract: Education is one of the most important things and cannot be separated from life. Education can promote culture and uphold the nation in the eyes of the international community. The thinking of advanced society will form the Human Resources of good quality in terms of spiritual, intelligence and high skills. Therefore, it was necessary to improve the quality of education. So that our nation does not depend on the status of a developing nation but can bear the predicate of a developed nation and no less competitive with the European nation. An overview of the achievement of the nine years Compulsory Education through 2015-2017 shows that the Participation Grade rate at the junior high school / equivalent level has reached at least 95%. In 2009 the National Rough Participation Rate has reached 98.11%, so the 9-year compulsory education program has been completed in accordance with the time targeted by the Indonesian government and even that target can be achieved 7 years earlier than the declared international commitment in Dakar on Education for All (EFA) in 2000 which requires all countries in the world to complete 9 years compulsory education by 2015. Based on these considerations, the study sites of two MTs Muhammadiyah institutions in Kotanopan (Mandailing Natal Regency) were selected. The main problem in this research was "Implementation of Nine Years of Compulsory Education Program at Muhammadiyah Educational Institution in Mandailing Natal Regency" until now the program has not been completed yet. The focus of this research was described in sub-focus: Implementation of compulsory education program of nine years basic education; Community participation; Identify the obstacles faced and the efforts made by the Office of Education towards the completion of the program.

Pendidikan merupakan salah satu hal sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Dengan adanya pendidikan bisa memajukan kebudayaan dan mengangkat derajat bangsa di mata dunia internasional. Pemikiran masyarakat yang maju akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas (baik dari segi spiritual, intelegensi dan skill) tinggi. Untuk itu, perlu diusahakan peningkatan mutu pendidikan, supaya bangsa kita tidak tergantung pada status bangsa yang sedang berkembang tetapi bisa menyandang predikat bangsa yang maju dan tidak kalah bersaing dengan bangsa eropa. Gambaran umum mengenai pencapaian penuntasan wajar dikdas sembilan tahun hingga

tahun 2015-2017. Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/ sederajat. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu pada tahun 2015-2017 bertujuan untuk meningkatkan APK SMP/MTs/ setara hingga mencapai minimal 95%. Pada tahun 2009 APK nasional telah mencapai 98,11%, sehingga program wajib belajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan pemerintah Indonesia dan bahkan target itu dapat dicapai 7 tahun lebih awal dibandingkan dengan komitmen internasional yang dideklarasikan di Dakar mengenai *Education for All (EFA)* tahun 2000 yang mewajibkan semua negara di dunia harus menuntaskan wajib belajar 9 tahun paling lambat 2015. Berdasarkan beberapa pertimbangan maka dipilih lokasi penelitian pada dua lembaga pendidikan MTs Muhammadiyah di wilayah Kotanopan (Kabupaten Mandailing Natal). Permasalahan utama dalam penelitian ini, adalah "Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan (9) Tahun pada Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Mandailing Natal" ternyata sampai saat ini program tersebut belum seluruhnya tuntas. Fokus penelitian ini dijabarkan dalam sub fokus: Implementasi program wajib belajar pendidikan dasar sembilan tahun; Peran serta masyarakat; Identifikasi hambatan yang dihadapi dan upaya-upaya yang dilakukan jajaran Dinas Pendidikan terhadap penuntasan program tersebut. Penelitian yang dipilih adalah kualitatif. Adapun alasannya adalah karena peneliti ingin menggali secara maksimal dan data tentang "Implementasi program wajib belajar sembilan (9) tahun pada lembaga pendidikan Muhammadiyah di kabupaten Mandailing Natal" melalui instrumen observasi langsung dan wawancara. Hal ini sudah sama kita ketahui bahwa penelitian kualitatif itu suatu jenis penelitian tentang kehidupan seseorang, cerita, perilaku, dan juga tentang fungsi organisasi, gerakan sosial atau hubungan timbal balik.

Kata Kunci: Implementasi Program, Wajib Belajar, Pendidikan Muhammadiyah

Pendahuluan

Pendidikan merupakan salah satu hal sangat penting dan tidak bisa dilepaskan dari kehidupan. Dengan adanya pendidikan bisa memajukan kebudayaan dan mengangkat derajat bangsa di mata dunia internasional. Pemikiran masyarakat yang maju akan membentuk Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkualitas (baik dari segi spiritual, intelegensi dan skill) tinggi. Untuk itu, perlu diusahakan peningkatan mutu pendidikan, supaya bangsa kita tidak tergantung pada status bangsa yang sedang berkembang tetapi bisa menyandang predikat bangsa yang maju dan tidak kalah bersaing dengan bangsa eropa.¹

Telah menjadi rahasia umum bahwa kemajuan suatu bangsa bisa dipengaruhi oleh suatu faktor pendidikan. Kita lihat saja, Negara super power seperti Amerika Serikat dan Rusia. Mereka tidak akan bisa menjadi Negara yang ditakuti dunia jika pendidikan mereka setatap dengan pendidikan nasional Indonesia. Contoh lain, Negara Jepang yang terkenal dengan kehebatan sains dan teknologinya. Mengapa Jepang bisa menjadi

¹M. Joko Susilo, *Pembodohan Siswa Tersistematis*, Cet. 3 (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009) h. 13.

Rizaluddin: Implementasi Program Wajib Belajar 9 Tahun

menjadi Negara berteknologi tinggi? Sedangkan kita hanya mampu berkuat dalam pengguna teknologi. Jepang adalah Negara yang menghargai pendidikan, mendahulukan kepentingan pendidikan dari pada kepentingan yang lain dan tidak segan-segan mengeluarkan dana besar untuk pendidikan. Sedangkan dinegara kita masih sibuk membicarakan kedudukan sehingga pendidikan menjadi perhatian yang kesekian, belum lagi masalah bencana alam yang sering melanda bumi Indonesia yang menyebabkan beban biaya yang sangat besar bagi Indonesia.

Masalah pendidikan juga tidak lepas dari peran pemerintah. Pemerintah mengutamakan pentingnya pendidikan bagi seluruh masyarakat dengan meningkatkan mutu pendidikan. Oleh karena itu, pemerintah berkewajiban untuk memenuhi hak setiap warga negara dalam memperoleh layanan pendidikan guna meningkatkan kualitas hidup bangsa Indonesia.

Sejarah panjang pendidikan di Indonesia menunjukkan pembaharuan pendidikan yang radikal melalui Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang mendelegasikan otoritas pendidikan pada daerah, Undang-Undang tersebut mengamanatkan bahwa:

- a. Setiap warga negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar.
- b. Pasal 34 ayat 2 menyebutkan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjamin terselenggaranya wajib belajar minimal pada jenjang pendidikan dasar tanpa memungut biaya,
- c. sedangkan dalam ayat 3 menyebutkan bahwa wajib belajar merupakan tanggung jawab negara yang diselenggarakan oleh lembaga pendidikan pemerintah, pemerintah daerah, dan masyarakat.

Konsekuensi dari amanat undang-undang tersebut adalah pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan layanan pendidikan bagi seluruhpeserta didik pada tingkat pendidikan dasar sembilan tahun (SD dan SMP) serta satuan pendidikan lain yang sederajat.²

Pendidikan menurut pandangan Islam adalah merupakan sesuatu yang sangat penting.Mengingat perannya yang sangat dominan dalam pengembangan sumber daya manusia (insani), menuju terbentuknya manusia sempurna (insan kamil).Manusia pada dasarnya memiliki

²Departemen Pendidikan Nasional,*Peraturan Pemerintah RepublikIndonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun*. (Jakarta:Departemen Pendidikan Nasional, 2010) h. 36.

kemampuan yang dibawa dari sejak lahir yakni jasmaniah dan rohaniah. Agar manusia dapat mengarungi kehidupan dengan sejahtera yang sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditentukan dalam agama supaya selamat di dunia dan akhirat.

Ada tiga istilah arab yang biasa dimaknai sebagai pendidikan, yakni: *tarbiyah*, *ta'lim* dan *ta'dib*. Kata-kata tersebut bisa ditemukan dalam alqur'an dan hadist. Tentang mana yang lebih tepat untuk dijadikan istilah baku dalam pendidikan, terdapat khilafiah dikalangan pakar pendidikan Islam.

Setidaknya Abdurrahman al-Nahlawi mencoba untuk berpendapat tentang pendidikan, menurut beliau kata *tarbiyah* yang paling tepat dalam menggambarkan pengertian pendidikan.³ Menurut al-Nahlawi dapat dilacak dari tiga asal usul kata; *pertama* berasal dari kata *rabâ-yarbû* yang artinya bertambah dan tumbuh. Dalam al-Qur'an pengertian ini dapat dilihat pada surat ar-Rum:

وَمَا آتَيْتُم مِّن رَّبًّا لِّيَرْبُوًّا فِي أَمْوَالِ النَّاسِ فَلَا يَرْبُوا عِنْدَ اللَّهِ وَمَا آتَيْتُم مِّن
زَكَاةٍ تُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُضْعِفُونَ ﴿٣٩﴾

Artinya: Dan sesuatu riba (tambahan) yang kamu berikan agar dia bertambah pada harta manusia, maka riba itu tidak menambah pada sisi Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat yang kamu maksudkan untuk mencapai keridhaan Allah, maka (yang berbuat demikian) itulah orang-orang yang melipat gandakan (pahalanya).⁴

Kedua, berasal dari kata *rabiyyayarbâ* dengan *wazn khafiya-yakhfâ* artinya menjadi besar. *Ketiga*, berasal dari kata *rabba-yarubbu* dengan *wazn madda-yamuddu* artinya memperbaiki, menguasai urusan, menuntun, menjaga dan memelihara. Untuk memperkuat alasannya, al-Nahlawi mengutip pendapat Imam Baidawi dalam *Tafsir Anwâr al-Tanzîl wa-Asrâr al-Ta'wîl*. Al- Baidawi mengatakan bahwa makna asal *al-rabb* adalah *al-tarbîyah*, yaitu penyampaian sesuatu sedikit demi sedikit hingga sempurna. Senada dengan pendapat ini adalah *ar-Râghib al-Asfahânî* yang mengatakan bahwa makna asal *al-rabb* adalah *al-tarbîyah*, yaitu memelihara sesuatu sedikit demi sedikit hingga sempurna.⁵

³Abdurrahman al-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di sekolah dan di Masyarakat*, Terj. Herry Noer Ali (Bandung: Diponegoro, 1992) h. 30-32.

⁴(Al-Quran Surah Ar-Rum [30]:39).

⁵Abdurrahman al-Nahlawi, *Prinsip-prinsip*,... h. 30-32.

Selanjutnya dengan mengacu pada beberapa dalil, al-Farabi percaya bahwa belajar pada hakikatnya belajar merupakan proses mencari ilmu pengetahuan yang muaranya tiada lain untuk memperoleh nilai-nilai, ilmu pengetahuan, dan keterampilan praktis dalam supaya untuk menjadi manusia sempurna (*al- insan al-kamil*).⁶

Belajar atau pembelajaran dianggap sebagai proses yang dilakukan pendidika kepada peserta didik dalam hal perubahan perilaku sebagai akibat dari pengalaman dan latihan. Hilgard mengungkapkan dalam Wina Sanjaya:

“ learning is the process by wich an activity originates or changed through training procedurs (wether in the laboratory or in the natural environment) as distinguished from changes by factors not atributable to training.” Bagi Hilgard, belajar itu adalah proses perubahan melalui kegiatan atau prosedur latihan baik latihan di dalam laboratorium maupun dalam lingkungan alamiah.⁷

Belajar adalah berusaha, berlatih dan mendapat pengetahuan. Belajar adalah proses pertumbuhan perilaku yang dapat dinyatakan dalam bentuk penguasaan, penggunaan, dan penilaian tentang pengetahuan, sikap dan nilai serta keterampilan. Menurut James O. Whittaker dalam Muhammad Ali, belajar dapat didefinisikan sebagai proses dimana tingkah laku diubah melalui latihan atau pengalaman.⁸

Menurut Zikri belajar (*learning*), adalah perubahan yang secara relatif berlangsung lama pada perilaku yang diperoleh dari pengalaman-pengalaman. Belajar merupakan salah satu bentuk perilaku yang amat penting bagi kelangsungan hidup manusia.⁹ Belajar dan pembelajaran merupakan sebuah proses perubahan yang dilakukan oleh seseorang dari yang sebelumnya belum mampu menjadi mampu, dan hal itu terjadi dalam jangka waktu tertentu. Perubahan yang terjadi harus secara relatif bersifat menetap (permanen) dan tidak hanya terjadi pada perilaku yang saat ini nampak (*immediate behavior*), tetapi perilaku yang mungkin terjadi di masa yang akan datang (*potential behavior*). Oleh karena itu, perubahan-

⁶Muhammad Yaumi, *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2013), h. 27.

⁷Wina Sanjaya, *Metode Pembelajaran*, h. 112.

⁸Muhammad Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern*(Surabaya: Balai Pustaka Aman,2003), h. 51.

⁹Zikri Neni Iska,*Psikologi (Pengantar Pemahaman Diri dan Lingkungan)*, (Jakarta:Kizi Brother's, 2006), h. 76.

perubahan bisa terjadi karena adanya proses pembelajaran dari sebuah pengalaman.¹⁰

Sedangkan menurut Hilgard dan Bower, dalam buku *Theories of Learning*, seperti dikutip Dalyono mengemukakan “Belajar berhubungan dengan perubahan tingkah laku seseorang terhadap sesuatu situasi tertentu yang disebabkan oleh pengalamannya yang berulang-berulang dalam situasi itu, dimana perubahan tingkah laku itu tidak dapat dijelaskan atas dasar kecenderungan respon pembawaan, kematangan, atau keadaan-keadaan sesaat seseorang (misalnya kelelahan, pengaruh obat dan sebagainya).”¹¹

Dengan pendidikan derajat dan martabat manusia di tinggikan oleh Allah Swt, sebagaimana Firman Allah Swt dalam Al-Qur’an:

..... وَإِذَا قِيلَ اذْهَبُوا فَانْهَبُوا فَانْهَبُوا يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا

الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾

Artinya:Dan apabila dikatakan: "Berdirilah kamu", maka berdirilah, niscaya Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. Dan Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan.¹²

فَتَعَلَّمَ اللَّهُ الْمَلَائِكَةَ الْحَقُّوْلَا تَعَجَّلُوا الْقُرْءَانَ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّزِدْنِي

يَعْلَمًا ﴿١١٤﴾

Artinya: Maka Maha Tinggi Allah Raja Yang sebenar-benarnya, dan janganlah kamu tergesa-gesa membaca Al qur’an sebelum disempurnakan mewahyukannya kepadamu, dan katakanlah: "Ya Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu pengetahuan"¹³

¹⁰*Ibid.*,

¹¹M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997), h. 211-212.

¹²(Al-Quran Surah Al-Mujadallah [58]:11).

¹³(Al-Quran Surah Toha [20]:114).

Dilihat dari jalur pendidikan, dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas) No. 20 Tahun 2003 pasal 13 ayat 1 dinyatakan bahwa jalur pendidikan terdiri dari pendidikan formal, non formal dan informal. Selanjutnya sesuai dengan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tersebut, setiap warga Negara berhak untuk memperoleh kesempatan belajar dengan cara yang paling sesuai dengan minat dan bakat dan kondisi mereka yang ditunjukan bagi terwujudnya masyarakat belajar melalui proses belajar yang berlangsung seumur hidup. Berikut perbedaan jalur pendidikan:

Table 1

Pendidikan Formal	Pendidikan Non Formal	Pendidikan Informal
<ul style="list-style-type: none">- Ada tempat pembelajaran khusus (gedung sekolah)- Ada persyaratan khusus untuk menjadi peserta didik.- Ada kurikulum yang jelas- Materi pembelajaran bersifat akademis.- Proses pendidikannya berjangka waktu lama.- Ada ujian formal.- Penyelenggara pendidikan adalah pemerintah atau swasta.- Tenaga pengajar memiliki kualifikasi tertentu.- Diselenggarakan dengan administrasi yang tertib dan seragam.	<ul style="list-style-type: none">- Pembelajarannya dapat berlangsung diluar gedung.- Tidak diperlukan persyaratan khusus.- Biasanya tidak memiliki jenjang yang jelas.- Adanya program tertentu yang khusus yang hendak ditangani.- Bersifat praktis dan spesifik.- Pendidikannya berlangsung singkat.- Terkadang ada ujian- Dapat dilakukan oleh pemerintah dan swasta	<ul style="list-style-type: none">- Pembelajaran berlangsung dimana saja.- Tanpa persyaratan formal- Tidak memiliki jenjang- Program tidak terencana secara formal.- Tidak ada materi formal yang sudah ditentukan.- Tidak ada ujian.- Tidak ada lembaga formal sebagai penyelenggara.

Ada 16.840 sekolah baik negeri maupun swasta dari tingkat SD/MI (10.572), SMP/MTs (3.672), SMA/MAS (1618) di Sumatera Utara. Ada sekitar 612 sekolah baik negeri maupun swasta yang berada di Kabupaten Mandailing Natal SD/MI (406), SMP/MTs (128), SMA/MAS (57).¹⁴ Kabupaten Mandailing Natal (Madina) memiliki lembaga pendidikan formal, non formal dan informal. Lembaga pendidikan formal Muhammadiyah salah satu yang menangani dunia pendidikan. Ada sekitar delapan (8) SMP/Mts Muhammadiyah. Berikut lembaga pendidikan muhammadiyah Mandailing Natal:

1. MTs Swasta Muhammadiyah 8 Siabu, Kec. Siabu
2. MTs Swasta Muhammadiyah 10 Kotanopan, Kec. Kotanopan
3. MTs Swasta Muhammadiyah 11 Batahan, Kec. Batahan
4. MTs Swasta Muhammadiyah 20 Natal, Kec. Natal
5. MTs Swasta Muhammadiyah 23 Sinunukan, Kec. Sinunukan
6. SMP Swasta Muhammadiyah 30 Sihepeng, Kec. Siabu
7. SMP Swasta Muhammadiyah 31 Penyabungan, Kec. Penyabungan Kota
8. SMP Swasta Muhammadiyah 40 Kotanopan, Kec. Kotanopan

Gambaran umum mengenai pencapaian penuntasan wajar dikdas sembilan tahun hingga tahun 2015-2017. Angka Partisipasi Kasar (APK) tingkat SMP/ sederajat. Penuntasan program wajib belajar 9 tahun yang bermutu pada tahun 2015-2017 bertujuan untuk meningkatkan APK SMP/MTs/ setara hingga mencapai minimal 95%. Pada tahun 2009 APK nasional telah mencapai 98,11%, sehingga program wajib belajar 9 tahun telah tuntas sesuai dengan waktu yang telah ditargetkan pemerintah Indonesia dan bahkan target itu dapat dicapai 7 tahun lebih awal dibandingkan dengan komitmen internasional yang dideklarasikan di Dakar mengenai *Education for All (EFA)* tahun 2000 yang mewajibkan semua negara di dunia harus menuntaskan wajib belajar 9 tahun paling lambat 2015.¹⁵

Peningkatan sumber daya manusia yang dilakukan lewat pendidikan menghadapi beberapa kendala diantaranya faktor lingkungan fisik maupun non fisik. Penuntasan keberhasilan wajib belajar 9 tahun dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu faktor internal (dalam diri) dan faktor eksternal (luar

¹⁴Refferensi.data.kemendikbud.go.id/index11.php diakses 17 april 2017

¹⁵*ibid*,...Departemen Pendidikan Nasional,...

diri) siswa. Faktor internal, meliputi: kemampuan, minat, motivasi, nilai-nilai dan sikap, ekspektasi (harapan), dan persepsi siswa tentang sekolah. Faktor eksternal, meliputi: latar belakang ekonomi orangtua, persepsi orangtua tentang pendidikan, jarak sekolah dari rumah, hubungan guru-murid, usaha yang dilakukan pemerintah. Banyaknya siswa yang tidak berhasil dalam belajar, termasuk banyaknya anak-anak yang tidak sekolah bisa dilihat dari kedua aspek tersebut.¹⁶

Pendidikan sangat penting bagi masyarakat, maka dari itu peneliti tergugah untuk mengadakan penelitian mengenai pendidikan pada suatu tempat. Fenomena yang terjadi di Kabupaten Mandailing Natal adalah APK pada jenjang SMP belum sesuai dengan target pemerintah, selain itu masih terdapat anak usia 7-15 tahun yang belum memperoleh pendidikan. Dari penjelasan tersebut, maka peneliti memilih judul **“Implementasi Program Wajib Belajar Sembilan (9) Tahun pada Lembaga Pendidikan Muhammadiyah di Kabupaten Mandailing Natal”**. Tujuan utama yang ingin dicapai adalah implementasi program wajib belajar sembilan tahun.

Kajian Teori

Pendidikan tidak hanya dipandang sebagai usaha pemberian informasi dan pembentukan ketrampilan saja, namun diperluas sehingga mewujudkan keinginan, kebutuhan, dan kemampuan individu, sehingga tercipta pola hidup pribadi dan sosial yang baik. Pasal 3 UU RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, menyebutkan bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.¹⁷

Memperhatikan target penuntasan wajar dikdas sembilan Tahun yang bermutu dan berbagai tantangan sebagaimana dikemukakan di atas terdapat beberapa tiga program yang selayaknya dilakukan, yaitu:¹⁸

¹⁶Alwen Bentri, *Efektivitas Pelaksanaan Wajib Belajar di Sumatra Barat* (Padang: Universitas Negeri Padang, 2007). h. 2

¹⁷*Ibid*,...h.17.

¹⁸Depdiknas, *Strategi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas, 2006).

1. Perluasan dan pemerataan kesempatan belajar,
2. Peningkatan mutu, relevansi dan daya saing pendidikan, dan
3. Peningkatan mutu *governance*, akuntabilitas, dan pencitraan publik dalam pengelolaan pendidikan.

Secara garis besar ketiga program tersebut dapat diuraikan secara ringkas sebagai berikut:

1. Pembangunan Unit Sekolah Baru SMP/MTs,
2. Pembangunan Ruang Kelas Baru,
3. Subsidi Siswa,
4. Pembangunan SD-SMP Satu Atap,
5. SMP Terbuka, dan
6. Sosialisasi dan Kerjasama Penuntasan Wajib Belajar

UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional bahwa jalur pendidikan terdiri dari atas pendidikan formal, pendidikan informal, dan pendidikan nonformal yang dapat saling melengkapi dan memperkaya. Pendidikan diselenggarakan dengan sistem terbuka melalui tatap muka dan atau melalui jarak jauh.

1. Pendidikan Formal

Di Indonesia, semua penduduk wajib mengikuti program wajib belajar pendidikan dasar selama sembilan tahun, enam tahun di sekolah dasar dan tiga tahun di sekolah menengah pertama. Saat ini, pendidikan di Indonesia diatur melalui Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional. Pendidikan di Indonesia terbagi menjadi 3 jalur utama, yaitu formal, nonformal, dan informal.¹⁹ UU 20 tahun 2003 Bab I Pasal I Ayat I. Jadi, Pendidikan formal merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya dengan kegiatan yang sistematis, berstruktur, bertingkat, berjenjang, dimulai dari sekolah dasar sampai dengan perguruan tinggi dan yang setaraf dengannya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas, mulai dari pendidikan dasar, pendidikan menengah, sampai pendidikan tinggi. Pendidikan formal meliputi:

- a. Pendidikan dasar
- b. Pendidikan menengah
- c. Pendidikan tinggi

2. Pendidikan Informal

Hasil pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal 27 bagian keenam UU No. 20 tahun 2003 diakui sama dengan pendidikan

¹⁹Departemen Pendidikan Nasional,... h. 98.

formal dan nonformal setelah peserta didik lulus ujian sesuai dengan standar nasional pendidikan. Ketentuan mengenai pengakuan hasil pendidikan informal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal 27 bagian keenam UU No. 20 tahun 2003 diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah.²⁰ Pendidikan informal adalah suatu fase pendidikan yang berada di samping pendidikan formal dan nonformal.

3. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat. Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

Implementasi Wajib Belajar

Wajib belajar diamanatkan dalam UU No. 47 tahun 2008 tentang setiap warga Negara yang berusia 7-15 tahun wajib mengikuti pendidikan dasar. Pasal 1 menyebutkan bahwa wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah. Pendidikan dasar adalah jenjang pendidikan yang melandasi jenjang pendidikan menengah, bentuk SD dan MI/ bentuk lain yang sederajat serta SMP dan Madrasah Tsanawiyah/ bentuk lain yang sederajat.

Program wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun di Indonesia bukanlah wajib belajar dalam arti *compulsory education*, seperti yang dilaksanakan di negara-negara maju, dengan ciri-ciri:²¹

1. Ada unsur paksaan agar peserta didik bersekolah,
2. Diatur dengan undang-undang tentang wajib belajar,
3. Tolak ukur wajib belajar 9 tahun adalah tidak ada orang tua yang terkena sanksi, karena telah mendorong anaknya tidak bersekolah, dan
4. Ada sanksi bagi orang tua yang membiarkan anaknya tidak sekolah.

Menurut sistem penilaian EDI yang membagi tiga kategori skor, yaitu kelompok negara dengan indeks pendidikan tinggi (0,950 keatas), sedang (0,800 sampai dibawah 0,950) dan rendah (dibawah 0,800). Maka

²⁰ *Ibid.* h. 30.

²¹ Tim Pengembangan Ilmu,... h. 121.

menempatkan Indonesia, Malaysia, Filipina, Vietnam, Myanmar dan Kamboja, berada di kelompok negara dengan kategori EDI sedang. Sementara Indeks Pendidikan Brunei Darussalam menempati peringkat tinggi.²²

Pembahasan

1. Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal

a) MTs Muhammadiyah 40 Kotanopan

MTs Muhammadiyah 40 Kotanopan dengan NPSN 10208061, alamat Jl. Medan-Padang Km. 8 Tamiang dengan waktu penyelenggaraan pagi selama 6 hari. Di sekolah MTs Muhammadiyah 40 Kotanopan memiliki 2 guru, siswa di MTs Muhammadiyah 40 Kotanopan ini memiliki 15 laki-laki dan 18 perempuan serta rombongan belajar 3, Madrasah ini menggunakan kurikulum KTSP, luas tanah 2.400 M², Laboratorium 1, perpustakaan 1 dan sanitasi siswa 2.

Lingkungan atau lahan di daerah MTs Muhammadiyah 40 didominasi pertanian dan tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap jenis mata pencaharian yang dilakukan oleh orang tua. Hal ini terbukti bahwa di Kecamatan Kotanopan jenis pekerjaan orang tua 65,28% adalah sebagai petani. Lahan penggunaannya tanah di Kecamatan Kotanopan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk sekitar. Pekerjaan lain selain sebagai petani adalah orang tua 11,11% bekerja sebagai buruh dan 27,08% pedagang. Aksesibilitas dari rumah ke MTs Muhammadiyah 40 tidak terlalu jauh sekitar 1-2 KM. Transportasi dan jalan begitu bagus. Tidak ada permasalahan untuk jarak.

b) MTS Muhammadiyah 10

Kotanopan memiliki 6 SMP/MTs Negeri maupun Swasta, MTs Muhammadiyah 10 terletak Kotanopan, salah satunya adalah MTs Muhammadiyah 10 di Kec. Kotanopan dengan NPSN 10264340. Dengan jumlah siswa 40 orang. Untuk kelas VII berjumlah 15 orang, kelas VIII 15 orang dan kelas IX berjumlah 10 orang.

No	Jumlah siswa kelas VII		Jumlah siswa kelas VIII		Jumlah siswa kelas IX		Jumlah
	LK	PR	LK	PR	LK	PR	
1	7	8	10	5	6	4	40

²² Lihat Kompas, 31 Desember 2007:14

Kondisi tersebut apabila dilihat dari sisi pengembangan kualitas SDM secara umum cukup menggembirakan karena tujuan negara ini mengacu kearah tersebut. Kecenderungan bahwa pelaksanaan wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Kotanopan khusus di Muhamaddiyah 10 kotanopan berjalan dengan baik dan sukses. Walaupun masih mengalami hambatan-hambatan, tetapi dalam perjalanan pelaksanaannya tetap dilakukan berbagai upaya-upaya yang inovatif.

Hakekatnya BOS bertujuan untuk menyukseskan program wajib belajar 9 tahun, dengan harapan tak ada lagi anak yang tidak sekolah dengan dalih tak punya biaya. Pesan inti program BOS adalah membebaskan biaya pendidikan bagi siswa tidak mampu dan meringankan siswa lain yang mampu, agar mereka memperoleh layanan pendidikan dasar bermutu sampai tamat, selama sembilan tahun. Maka, target program BOS adalah menjamin lulusan SD/MI untuk melangsungkan pendidikannya hingga tingkat SMP/MTs. Tidak boleh ada siswa miskin yang tidak mampu melanjutkan ke SMP/MTs hanya karena mahalny biaya sekolah.

Fakta dalam pelaksanaan bahwa masih terdapat beberapa anak di Kecamatan Kotanopan yang tidak sekolah. Jika dilihat dari faktor eksternal, masih terdapatnya anak yang tidak sekolah di Kecamatan Kotanopan dikarenakan oleh karakter keluarga, lingkungan keluarga, tingkat pendidikan orang tua, jenis pekerjaan orang tua, tingkat pendapatan orang tua dan aksesibilitas. Informasi yang dapat diperoleh tentang anak yang usia 7-15 tahun yang tidak sekolah di Kecamatan Kotanopan dapat dikarenakan oleh beberapa karakteristik.

- a. Desa Sayur Maincat memiliki jumlah penduduk usia 7-15 tahun yang tidak sekolah paling tinggi yaitu 21 orang.
 - b. Sekolah ini memiliki lokasi/ jarak tempuh dari pusat Kecamatan Kotanopan paling jauh yaitu 17 km².
2. Hambatan Pelaksanaan Program Wajib Belajar 9 Tahun di MTs Muhammadiyah 10 Kec. Kotanopan, Kab. Mandailing Natal

Tingkat pendidikan formal orang tua 45,84% pada tingkat SMP. Ijasah terakhir yang diperoleh orang tua rata-rata adalah berada di tingkat SMP dengan lamanya sekolah 14 tahun. Orang tua yang kurang pendidikan kurang mampu mempunyai gagasan jauh ke depan terhadap perkembangan dan tujuan anaknya. Sebaliknya kelompok orang tua yang berpendidikan mempunyai gagasan jauh ke depan terhadap kemajuan dan perkembangan anaknya. Pendidikan formal yang pernah ditempuh oleh

orang tua akan berpengaruh terhadap kelanjutan pendidikan anaknya. Karena hal tersebut akan menjadi dorongan dan motivasi anak untuk maju.

Tingkat pendidikan orang tua akan berpengaruh terhadap jenis mata pencaharian yang dilakukan oleh orang tua. Hal ini terbukti bahwa di Kecamatan Kotanopan jenis pekerjaan orang tua 65,28% adalah sebagai petani. Lahan penggunaannya tanah di Kecamatan Kotanopan dimanfaatkan sebagai lahan pertanian, sehingga hal tersebut berpengaruh terhadap mata pencaharian penduduk sekitar. Pekerjaan lain selain sebagai petani adalah orang tua 11,11% bekerja sebagai buruh dan 27,08% pedagang.

Keluarga adalah kelompok masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri dan anak yang belum dewasa. Apabila salah satu dari unsur-unsur tersebut tidak ada, misal: ada ibu namun tidak ada ayah (baik karena meninggal atau bercerai), maka keluarga tersebut tidak bisa dikatakan sebagai keluarga yang utuh lagi. Ini disebut keutuhan keluarga secara stuktur. Disamping itu ada pula keutuhan dalam interaksi, yaitu adanya interaksi sosial yang wajar (harmonis).

Aksesibilitas merupakan suatu ukuran kemudahan lokasi tata guna lahan berinteraksi satu sama lainnya dengan melalui transportasi. Jarak jauhnya rumah ke sekolah mempengaruhi minat siswa untuk sekolah. Semakin jauh jarak antar daerah berarti semakin susah aksesibilitas terjadi dan semakin sulit daerah itu mengalami kemajuan. Jarak yang ditempuh anak untuk sekolah 15-20 km dan rata-rata kendaraan yang digunakan anak untuk berangkat sekolah didominasi oleh jalan kaki dan sepeda. Sehingga membutuhkan waktu siswa pergi dan pulang sekolah.

Solusi yang diberikan oleh peneliti, agar siswa tersebut cukup waktu belajar adalah memberikan asrama secara gratis. Begitu juga dengan logistic untuk siswa.

KESIMPULAN

Kesimpulan berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Kotanopan mengalami kenaikan.
2. Hambatan pelaksanaan program wajib belajar 9 tahun di Kecamatan Kotanopan Kabupaten Mandailing Natal, jarak tempuh waktu siswa dari rumah ke sekolah 3-5 jam dengan jarak tempuh 15-20 km.

3. Solusi yang diberikan oleh penulis menyediakan rumah singgah sangat jitu untuk menuntaskan program wajib belajar 9 tahun yang dirancang oleh pemerintah untuk daerah yang berkebutuhan khusus seperti jarak tempuh dari rumah ke sekolah.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran

M. Joko Susilo, *Pembodohan Siswa Tersistematis*, Cet. 3 (Yogyakarta: Pinus Book Publisher, 2009)

Departemen Pendidikan Nasional, *Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2008 Tentang Wajib Belajar 9 Tahun*. (Jakarta: Departemen Pendidikan Nasional, 2010)

Abdurrahman al-Nahlawi, *Prinsip-prinsip dan Metode Pendidikan Islam dalam Keluarga, di sekolah dan di Masyarakat*, Terj. Herry Noer Ali (Bandung: Diponegoro, 1992) h. 30-32.

Muhammad Yaumi, *Prinsip-Prinsip Desain Pembelajaran* (Jakarta: Kencana, 2013)

Muhammad Ali, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Modern* (Surabaya: Balai Pustaka Aman, 2003)

Zikri Neni Iska, *Psikologi (Pengantar Pemahaman Diri dan Lingkungan)*, (Jakarta: Kizi Brother's, 2006)

M. Dalyono, *Psikologi Pendidikan* (Jakarta: PT Rineka Cipta, 1997)

Alwen Bentri, *Efektivitas Pelaksanaan Wajib Belajar di Sumatra Barat* (Padang: Universitas Negeri Padang, 2007)

Depdiknas, *Strategi Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan dasar 9 Tahun*, (Jakarta: Direktorat Pembinaan Sekolah Menengah Pertama, Ditjen Mandikdasmen, Depdiknas, 2006).

Kompas, 31 Desember 2007:14